

**MODEL PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KELURAHAN BIRINGERE
KECAMATAN SINJAI UTARA KABUPATEN SINJAI*****A MODEL FOR POVERTY ALLEVIATION IN BIRINGERE VILLAGE,
NORTH SINJAI SUBDISTRICT, SINJAI REGENCY*****Adi Asrul¹**Universitas Pancasakti
Makassar¹
email:
adiasrul80@gmail.com**Anirwan²**Universitas Pancasakti
Makassar²
email:
anirwan.science@gmail.com**Nasir³**Universitas Pancasakti
Makassar³
email:
nasirsaja113@gmail.com

Abstrak: Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan penanggulangan yang komprehensif serta berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan model penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pemerintah kelurahan, instansi terkait, tokoh masyarakat, serta masyarakat penerima manfaat program. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Biringere dilaksanakan melalui empat pendekatan utama yang saling terintegrasi. Pertama, model bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, meskipun masih bersifat konsumtif dan belum sepenuhnya mendorong kemandirian ekonomi. Kedua, model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dilakukan melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal, dan pendampingan usaha yang berkontribusi terhadap peningkatan keterampilan, munculnya usaha baru, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Ketiga, model kolaboratif melibatkan pemerintah kelurahan, Dinas Sosial, Bappeda, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Keempat, pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi instrumen utama dalam meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan. Namun demikian, efektivitas model masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pendampingan, akurasi data, dan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi kelembagaan dan pembaruan data secara berkelanjutan guna meningkatkan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan.

Kata kunci: Penanggulangan Kemiskinan; Bantuan Sosial; Pemberdayaan Ekonomi.

Abstract: Poverty is a multidimensional social problem that requires comprehensive and sustainable intervention approaches. This study aims to analyze and describe the poverty alleviation model implemented in Biringere Village, North Sinjai District, Sinjai Regency. The research employed a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving village government officials, relevant agencies, community leaders, and beneficiaries of poverty alleviation programs. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the poverty alleviation model in Biringere Village is implemented through four integrated approaches. First, the social assistance model, including the Family Hope Program (PKH), Non-Cash Food Assistance (BPNT), and Direct Cash Assistance (BLT), plays a significant role in meeting the basic needs of poor households. However, this approach remains largely consumptive and has not fully promoted economic self-reliance. Second, the community economic empowerment model is implemented through the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) by providing skills training, capital assistance, and business mentoring, which contribute to improved skills, the establishment of new businesses, and increased household income. Third, the collaborative governance model involves the village government, the Social Affairs Office, the Regional Development Planning Agency (Bappeda), neighborhood associations (RT/RW), and community leaders in enhancing program effectiveness. Fourth, the Integrated Social Welfare Data (DTKS) serves as the primary instrument for improving the accuracy of beneficiary targeting. Nevertheless, the effectiveness of these models is still constrained by limited mentoring, data inaccuracy, and inadequate human resource capacity. Therefore, strengthening institutional synergy and continuously updating social welfare data are essential to improving the effectiveness of poverty alleviation programs.

Keywords: Poverty Alleviation; Social Assistance; Economic Empowerment.

IJI Publication

p-ISSN: 2774-1907
e-ISSN: 2774-1915
Vol. 6, No. 2, pp. 216-228
Maret 2026Unit Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia

PENDAHULUAN

Kemiskinan tetap menjadi salah satu isu pembangunan yang paling rumit dan strategis di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun telah diimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengatasi kemiskinan, eksistensi masyarakat miskin masih menjadi tantangan signifikan dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemahaman tentang kemiskinan telah berkembang, tidak lagi sekadar dilihat sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi sebagai kondisi multidimensional yang mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, perlindungan sosial, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pendekatan multidimensional terhadap kemiskinan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan pengukuran yang hanya berbasis pada pendapatan (Gasior et al., 2024). Temuan ini menegaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan strategi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada penguatan kapasitas dan akses masyarakat terhadap berbagai sumber daya pembangunan (Widyawati et al., 2026).

Dalam beberapa tahun terakhir, pengurangan kemiskinan telah menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional, sebagaimana tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama pada tujuan pertama yang menargetkan penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan persoalan dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan kultural (Gasior et al., 2024). Widyawati et al., (2026) menekankan bahwa kemiskinan ekstrem merupakan masalah multidimensional yang tidak dapat

diselesaikan hanya dengan pendekatan sektoral, melainkan memerlukan tata kelola yang terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program penanggulangan kemiskinan sangat tergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengintegrasikan berbagai instrumen kebijakan yang saling mendukung.

Salah satu instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah dalam mengurangi kemiskinan adalah program perlindungan sosial melalui berbagai bentuk bantuan sosial. Program perlindungan sosial dirancang untuk mendukung masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar serta mengurangi dampak risiko ekonomi yang bisa memperburuk kondisi kesejahteraan rumah tangga (Gasior et al., 2024). Gasior et al. (2024) menyatakan bahwa sistem perlindungan sosial yang adaptif memiliki peran penting dalam meningkatkan ketahanan masyarakat miskin terhadap berbagai guncangan ekonomi dan sosial. Di Indonesia, implementasi program bantuan sosial terlihat dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar (Simangunsong & Sihotang, 2023).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Simangunsong dan Sihotang (2023) menemukan bahwa bantuan sosial dapat membantu rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok serta mengurangi beban pengeluaran keluarga. Selain itu, Amiruddin dan Hasim (2023) menjelaskan bahwa program BPNT berkontribusi pada peningkatan akses pangan dan perbaikan kondisi ekonomi penerima manfaat. Namun, efektivitas bantuan sosial sering kali terbatas pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, sehingga belum

mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara optimal (Simangunsong & Sihotang, 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan program bantuan sosial dengan strategi pemberdayaan ekonomi agar masyarakat tidak terus-menerus bergantung pada bantuan pemerintah (Rahmadevi & Hertati, 2024).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan pendekatan yang banyak diterapkan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pengembangan keterampilan, akses terhadap sumber permodalan, penguatan kelembagaan ekonomi, serta penciptaan peluang usaha produktif (Rahmadevi & Hertati, 2024). Dalam konteks pembangunan daerah, pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai sebagai strategi yang efektif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja. Rahmadevi dan Hertati (2024) menjelaskan bahwa penguatan UMKM melalui pelatihan, bantuan modal, serta pendampingan usaha mampu meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat. Tambahan pula, penelitian yang dilakukan oleh Priambodo dan Djirimu (2024) menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi berbasis usaha produktif memiliki kontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan formal.

Keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan. Masalah kemiskinan yang kompleks memerlukan keterlibatan berbagai pihak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan (Lawelai & Nurmandi, 2023). Pendekatan pemerintahan kolaboratif menjadi salah satu model yang banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah publik, karena

memungkinkan terciptanya sinergi antara pemangku kepentingan. Lawelai dan Nurmandi (2023) menjelaskan bahwa pemerintahan kolaboratif dalam penanggulangan kemiskinan dapat meningkatkan efektivitas program melalui koordinasi sumber daya, penguatan partisipasi masyarakat, dan peningkatan akuntabilitas kebijakan. Temuan ini diperkuat oleh Feoh, Lambelanova, dan Tarigan (2025) yang menyatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dapat memperkuat efektivitas implementasi program pengentasan kemiskinan di tingkat lokal.

Dalam praktiknya, keberhasilan pemerintahan kolaboratif sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, koordinasi, dan komitmen dari semua aktor yang terlibat (Lawelai & Nurmandi, 2023). Fahriza dan Nurrahman (2026) menemukan bahwa kolaborasi yang efektif dapat meningkatkan transparansi, legitimasi, dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan. Sebaliknya, lemahnya koordinasi antar lembaga sering kali menjadi penyebab tidak optimalnya pelaksanaan program, sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas kebijakan (Feoh et al., 2025). Oleh karena itu, pembangunan mekanisme kolaborasi yang kuat menjadi sangat penting dalam mewujudkan sistem penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Aspek lain yang memiliki peranan penting dalam penanggulangan kemiskinan adalah ketersediaan data yang akurat. Ketepatan sasaran penerima bantuan sosial sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan (Widyaningsih et al., 2023). Pemerintah Indonesia memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data utama dalam menentukan penerima berbagai program bantuan sosial. Widyaningsih, Ruhmaniyati, dan Toyamah

(2023) menjelaskan bahwa kualitas DTKS berpengaruh langsung terhadap efektivitas program perlindungan sosial karena menentukan ketepatan sasaran penerima manfaat. Namun, Cahyadie et.al., (2023) mengungkapkan bahwa pengelolaan data kemiskinan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan pembaruan data, inclusion error, dan exclusion error yang dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembaruan dan validasi data secara berkala merupakan prasyarat penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan (Cahyadie et al., 2023).

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui beragam program pembangunan sosial dan ekonomi. Salah satu wilayah yang menjadi fokus implementasi program penanggulangan kemiskinan adalah Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara. Sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi Kabupaten Sinjai, Kelurahan Biringere memiliki karakteristik sosial ekonomi yang beragam, sehingga memerlukan pendekatan penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan kolaborasi kelembagaan, dan pemanfaatan data kesejahteraan yang akurat (Lawelai & Nurmandi, 2023; Widyaningsih et al., 2023).

Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah diimplementasikan di Kelurahan Biringere, antara lain melalui bantuan sosial, pengembangan UMKM, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta penggunaan DTKS sebagai dasar penetapan penerima bantuan. Meskipun demikian, efektivitas program tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pendampingan usaha, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, serta

permasalahan akurasi data penerima manfaat (Rahmadevi & Hertati, 2024; Lawelai & Nurmandi, 2023; Cahyadie et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai model penanggulangan kemiskinan yang diterapkan di Kelurahan Biringere untuk memahami bagaimana berbagai instrumen kebijakan tersebut bekerja secara terintegrasi dalam mengurangi kemiskinan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesenjangan penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar studi terdahulu masih mengkaji bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, pemerintahan kolaboratif, dan DTKS secara terpisah. Sementara itu, penelitian yang menganalisis keempat aspek tersebut secara terpadu dalam satu model penanggulangan kemiskinan pada tingkat kelurahan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai melalui kajian terhadap bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemerintahan kolaboratif, dan pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi kebijakan publik dan penanggulangan kemiskinan, serta menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, tepat sasaran, partisipatif, serta berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis model penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling, yang mencakup berbagai pemangku kepentingan, seperti aparaturnya kelurahan,

pejabat Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), ketua RT/RW, tokoh masyarakat, serta individu yang menjadi penerima manfaat dari program penanggulangan kemiskinan.

Data penelitian dikumpulkan melalui serangkaian metode, termasuk wawancara mendalam, observasi, dan kajian dokumentasi terhadap berbagai program bantuan sosial, inisiatif pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta dokumen Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam hal ini, analisis data dilakukan dengan mengadopsi model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang mencakup tiga tahap utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui metode triangulasi, yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, serta member checking, dengan tujuan untuk memastikan validitas temuan yang diperoleh. Fokus penelitian ini diarahkan pada berbagai aspek, termasuk model bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, kolaborasi dalam tata kelola (*collaborative governance*), dan pemanfaatan DTKS dalam konteks penanggulangan kemiskinan.

HASIL DAN DISKUSI

Fokus penelitian ini terarah pada empat aspek fundamental dalam mengembangkan model penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Aspek pertama adalah model bantuan sosial, yang mencakup implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ketiga program ini berfungsi sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong miskin.

Aspek kedua berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang dilakukan melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),

pelatihan keterampilan, penyediaan bantuan modal, serta pendampingan usaha. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat setempat.

Aspek ketiga mencakup penerapan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*), yang melibatkan partisipasi berbagai pihak, termasuk pemerintah kelurahan, Dinas Sosial, Bappeda, serta RT/RW dan tokoh masyarakat. Keterlibatan ini penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program penanggulangan kemiskinan.

Aspek terakhir adalah pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai instrumen utama dalam pendataan dan penetapan penerima manfaat program. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.

Keempat aspek tersebut dianalisis secara komprehensif untuk memahami efektivitas, keterkaitan, serta kontribusi masing-masing dalam membentuk model penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Hasil diskusi dan pembahasan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut.

Model Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bantuan Sosial

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Biringere dilaksanakan melalui suatu kombinasi pendekatan yang mencakup perlindungan sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menangani isu kemiskinan, tidak hanya dari sudut pandang pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan juga melalui peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, agar mereka dapat mencapai kemandirian secara berkelanjutan. Bantuan sosial berperan sebagai instrumen kunci dalam memenuhi kebutuhan dasar

individu dan keluarga yang hidup dalam kondisi miskin. Program-program yang diterapkan dalam konteks ini meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Berdasarkan temuan penelitian, bantuan-bantuan yang diberikan tersebut telah menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya dalam hal pangan, pendidikan, dan kesehatan keluarga. Sebagian besar informan yang terlibat dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa bantuan sosial tersebut berfungsi untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga, terutama pada saat terjadinya kenaikan harga kebutuhan pokok dan penurunan pendapatan keluarga.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan sosial berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial yang dapat menjaga ketahanan ekonomi masyarakat miskin. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Simangunsong dan Sihotang (2023) yang menyatakan bahwa bantuan sosial berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar. Amiruddin dan Hasim (2023) juga menjelaskan bahwa program BPNT berhasil meningkatkan akses pangan masyarakat, yang pada gilirannya mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa bantuan sosial masih memiliki keterbatasan dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Sebagian besar bantuan digunakan untuk keperluan konsumtif, sehingga dampaknya lebih bersifat jangka pendek. Kondisi ini menunjukkan bahwa bantuan sosial belum mampu secara optimal memutus rantai kemiskinan apabila tidak diiringi dengan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (Rahmadevi & Hertati, 2024; Priambodo & Djirimu, 2024). Temuan ini memperkuat pandangan Gasior et

al. (2024) bahwa efektivitas perlindungan sosial akan meningkat jika diintegrasikan dengan strategi peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

Model Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam upaya untuk mengatasi berbagai keterbatasan yang dihadapi, pemerintah Kelurahan Biringere telah menginisiasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menitikberatkan pada penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini dijalankan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi pelatihan keterampilan, penyediaan bantuan modal usaha, serta pendampingan dalam pengelolaan usaha (Rahmadevi & Hertati, 2024). Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi program ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha yang produktif. Beberapa peserta program melaporkan bahwa mereka telah memperoleh keterampilan baru yang signifikan dalam mendukung pengembangan sektor kuliner, perdagangan kecil, serta industri rumah tangga. Temuan ini secara jelas menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan UMKM efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengembangkan usaha yang tidak hanya produktif, tetapi juga kompetitif di pasar (Rahmadevi & Hertati, 2024).

Di samping peningkatan keterampilan, program pemberdayaan ekonomi ini juga berkontribusi terhadap kemunculan usaha-usaha baru serta peningkatan pendapatan masyarakat. Keadaan ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan ekonomi berperan signifikan sebagai strategi jangka menengah dan panjang dalam upaya penanggulangan kemiskinan (Priambodo & Djirimu, 2024). Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil yang diperoleh oleh Rahmadevi dan Hertati

(2024), yang menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan bagi UMKM dapat meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, Priambodo dan Djirimu (2024) menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi yang berbasis usaha produktif memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, karena mampu menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa integrasi antara program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi merupakan strategi yang lebih efektif dalam mendorong kemandirian masyarakat yang kurang beruntung serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah (Gasior et al., 2024; Rahmadevi & Hertati, 2024).

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Biringere masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi keberlanjutan usaha serta kemampuan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan secara mandiri. Kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan akses permodalan, sempitnya jangkauan pasar, dan minimnya pendampingan usaha yang berkelanjutan. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan menjadi hambatan dalam pengembangan usaha mikro yang dijalankan masyarakat.

Keterbatasan modal usaha merupakan masalah yang paling banyak diungkapkan oleh informan. Sebagian besar pelaku UMKM mengandalkan modal pribadi yang relatif kecil, sehingga kapasitas produksi dan pengembangan usaha menjadi terbatas. Kondisi ini membuat pelaku usaha kesulitan dalam melakukan diversifikasi produk, meningkatkan kualitas produksi, serta memperluas skala usaha. Meskipun terdapat bantuan modal dari pemerintah, jumlah bantuan yang diberikan umumnya masih terbatas dan belum mampu memenuhi

kebutuhan pengembangan usaha secara optimal. Akibatnya, sebagian pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya, terutama saat menghadapi kenaikan harga bahan baku atau penurunan daya beli masyarakat.

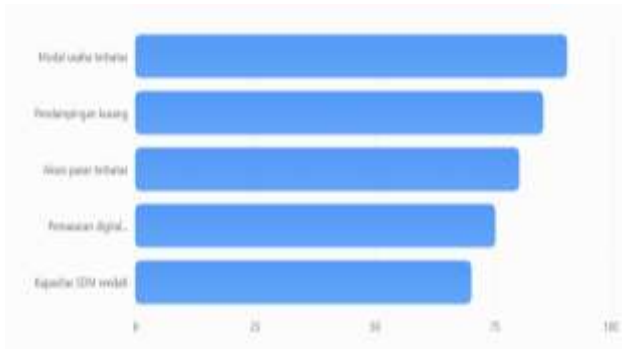
Selain keterbatasan modal, akses pasar yang masih sempit juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha memasarkan produknya hanya di lingkungan sekitar kelurahan atau melalui jaringan pelanggan yang terbatas. Pemanfaatan teknologi digital dan platform pemasaran daring masih relatif rendah, disebabkan oleh keterbatasan kemampuan teknologi informasi dan minimnya pelatihan dalam pemasaran digital. Padahal, perkembangan ekonomi digital memberikan peluang yang besar bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasar tanpa dibatasi oleh wilayah geografis. Oleh karena itu, rendahnya tingkat digitalisasi usaha menjadi salah satu faktor yang menghambat peningkatan pendapatan masyarakat.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah minimnya pendampingan usaha secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar program pelatihan dan bantuan modal hanya dilaksanakan pada tahap awal, tanpa diikuti dengan proses pendampingan yang intensif. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam menerapkan keterampilan yang telah diperoleh, mengelola keuangan usaha, menyusun strategi pemasaran, maupun menghadapi persaingan pasar. Padahal, pendampingan memiliki peran esensial dalam membantu pelaku usaha mengatasi berbagai permasalahan yang muncul selama proses pengembangan usaha. Tanpa adanya pendampingan yang berkelanjutan, manfaat pelatihan dan bantuan modal cenderung tidak optimal dan berisiko

menurunkan tingkat keberhasilan program pemberdayaan ekonomi.

Gambar 1.

Hambatan Program Pemberdayaan Ekonomi di Kelurahan Biringere



Sumber: Data Primer, 2026

Gambar 1 mengilustrasikan bahwa keterbatasan modal usaha merupakan faktor utama yang menghambat efektivitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, kurangnya pendampingan usaha yang berkelanjutan dan terbatasnya akses pasar juga menjadi hambatan signifikan yang mengakibatkan kesulitan dalam pengembangan usaha masyarakat secara optimal. Rendahnya pemanfaatan pemasaran digital dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia turut berkontribusi terhadap keberhasilan program tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi tidak hanya bergantung pada bantuan modal, melainkan juga memerlukan dukungan dalam bentuk pendampingan, akses pasar, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadevi dan Hertati (2024), yang mengungkapkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan modal, tetapi juga oleh kualitas pendampingan, akses pasar, dan dukungan kelembagaan. Selaras dengan itu, Priambodo dan Djirimu (2024) menjelaskan bahwa program pemberdayaan ekonomi akan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pengurangan kemiskinan apabila didukung oleh akses

pembiayaan yang memadai, penguatan kapasitas kewirausahaan, serta pengembangan jaringan pemasaran yang luas.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis guna memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pertama, pemerintah daerah diharuskan untuk memperluas akses terhadap permodalan melalui kemitraan dengan lembaga perbankan, koperasi, dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih mudah diakses oleh masyarakat miskin. Kedua, peningkatan kapasitas pemasaran digital harus dilakukan melalui pelatihan dalam penggunaan media sosial, platform e-commerce, dan strategi promosi digital, agar produk UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Ketiga, perlu adanya sistem pendampingan usaha yang berkelanjutan yang melibatkan pemerintah, akademisi, praktisi bisnis, dan lembaga pendamping UMKM. Pendampingan ini sebaiknya tidak hanya berfokus pada aspek teknis produksi, tetapi juga mencakup manajemen usaha, pengelolaan keuangan, inovasi produk, serta strategi pemasaran. Dengan demikian, program pemberdayaan ekonomi diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan.

Penguatan Model Collaborative Governance dan Pemanfaatan DTKS dalam Penanggulangan Kemiskinan

Keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Biringere tidak semata-mata bergantung pada bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi, melainkan juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola program. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah kelurahan, Dinas Sosial, Bappeda, RT/RW, tokoh masyarakat, dan pendamping sosial. Keterlibatan aktor-

aktor tersebut mencerminkan penerapan pendekatan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) dalam upaya mengatasi kemiskinan. Proses kolaborasi antar lembaga berlangsung dalam berbagai tahapan, mulai dari pendataan masyarakat yang tergolong miskin, verifikasi penerima bantuan, pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi, hingga proses monitoring dan evaluasi program. Melalui keterlibatan berbagai pihak, pengambilan keputusan menjadi lebih partisipatif dan transparan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap program pemerintah, berkat keterlibatan RT/RW dan tokoh masyarakat dalam penentuan penerima bantuan.

Temuan ini sejalan dengan pernyataan Lawelai dan Nurmandi (2023) yang berargumen bahwa tata kelola kolaboratif mampu meningkatkan efektivitas kebijakan publik melalui sinergi sumber daya dan koordinasi antara pemangku kepentingan. Penjelasan serupa juga disampaikan oleh Feoh et.al., (2025), yang menegaskan bahwa kolaborasi antar lembaga meningkatkan legitimasi dan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di tingkat lokal. Dalam mendukung tata kelola program, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi instrumen utama dalam menentukan penerima bantuan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa DTKS berperan penting dalam meningkatkan ketepatan sasaran program karena menjadi dasar dalam proses identifikasi dan verifikasi masyarakat miskin. Dengan adanya DTKS, pemerintah memiliki acuan yang lebih sistematis dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang memerlukannya.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa pengelolaan DTKS masih menghadapi sejumlah permasalahan. Salah satu kendala yang paling menonjol adalah keterlambatan pembaruan data, yang menyebabkan

perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak sepenuhnya terakomodasi dalam sistem. Selain itu, terdapat masalah inclusion error dan exclusion error, di mana beberapa individu yang tidak layak menerima bantuan tetap tercatat sebagai penerima, sementara beberapa masyarakat miskin lainnya tidak terakomodasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Widyaningsih et.al., (2023), yang menegaskan bahwa kualitas data merupakan faktor kunci dalam keberhasilan program perlindungan sosial. Cahyadie et.al., (2023) juga mencatat bahwa ketidakakuratan data masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Biringere tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan yang disalurkan kepada masyarakat, tetapi juga oleh kualitas tata kelola program yang diterapkan. Dalam hal ini, tata kelola kolaboratif dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) saling terkait dan berperan penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Secara substantif, tata kelola kolaboratif berfungsi sebagai mekanisme koordinasi yang menghubungkan berbagai aktor yang terlibat, yaitu pemerintah kelurahan, Dinas Sosial, Bappeda, RT/RW, tokoh masyarakat, pendamping sosial, dan masyarakat penerima manfaat. Keterlibatan aktor-aktor ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, sinkronisasi program, serta pembagian peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam perspektif tata kelola publik, kolaborasi menjadi instrumen penting mengingat permasalahan kemiskinan bersifat multidimensional dan tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh satu lembaga.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberadaan RT/RW dan tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan akurasi identifikasi masyarakat miskin. Aktor-

aktor lokal tersebut memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi sosial ekonomi warga dibandingkan dengan data yang bersifat administratif. Oleh karena itu, proses verifikasi dan validasi data menjadi lebih akurat ketika melibatkan unsur masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif berkontribusi terhadap peningkatan legitimasi kebijakan, karena masyarakat merasa memiliki ruang partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Namun, penelitian juga menemukan bahwa efektivitas kolaborasi masih terhambat oleh belum optimalnya koordinasi antar lembaga. Dalam beberapa kasus, proses pembaruan data dan penyampaian informasi masih berlangsung secara sektoral, yang mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan program. Akibatnya, terdapat perbedaan informasi antara kondisi riil masyarakat dan data yang tercatat dalam sistem, yang berpotensi menurunkan kualitas kebijakan karena keputusan yang diambil tidak sepenuhnya berdasarkan informasi yang mutakhir.

Dalam konteks ini, DTKS memiliki fungsi yang sangat penting sebagai instrumen kebijakan berbasis data (evidence-based policy). DTKS merupakan fondasi utama dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial, program pemberdayaan ekonomi, serta intervensi pemerintah lainnya. Dengan kata lain, kualitas DTKS secara langsung memengaruhi kualitas kebijakan penanggulangan kemiskinan. Apabila data yang digunakan akurat, maka bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran. Sebaliknya, jika data tidak diperbarui secara berkala, kemungkinan terjadinya inclusion error dan exclusion error akan semakin besar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inclusion error terjadi ketika individu yang secara ekonomi sudah mampu masih tercatat sebagai penerima bantuan, sementara exclusion error terjadi ketika masyarakat

miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak terdaftar dalam DTKS. Kedua kondisi ini tidak hanya menurunkan efektivitas program, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa hubungan antara tata kelola kolaboratif dan DTKS bersifat siklus yang saling menguatkan. Kolaborasi yang baik akan menghasilkan data yang lebih akurat, sementara data yang akurat akan meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran atau jumlah bantuan yang diberikan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam mengembangkan sistem tata kelola kolaboratif yang didukung oleh data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi.

Berikut gambar model rekomendasi penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

Gambar 2.
Model Rekomendasi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis *Colaborative Governance*



Sumber: Hasil analisis peneliti 2026

Interpretasi dari model ini mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan yang efektif harus dimulai dengan penguatan tata kelola kolaboratif yang melibatkan seluruh pihak terkait. Kolaborasi ini menjadi fundamental dalam proses

pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang pada gilirannya menghasilkan data yang lebih akurat. Data yang tepat akan meningkatkan efisiensi dalam penargetan bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya, kedua program tersebut berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan serta kemandirian ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan. Model ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam mengembangkan sistem pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, partisipatif, dan berbasis data.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa model penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dilaksanakan melalui pendekatan yang terintegrasi, yang mencakup kombinasi antara bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, governansi kolaboratif, serta pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Keempat komponen tersebut saling melengkapi satu sama lain, sehingga dapat mendukung upaya dalam pengurangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bantuan sosial yang disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) terbukti memainkan peranan penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dan mengurangi beban ekonomi yang dihadapi oleh rumah tangga. Meskipun demikian, manfaat yang diperoleh dari program-program tersebut masih cenderung bersifat jangka pendek, karena belum sepenuhnya mampu mendorong kemandirian ekonomi bagi penerima manfaat. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi suatu strategi yang sangat diperlukan untuk menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Program pelatihan keterampilan, bantuan modal, dan pendampingan usaha telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan kapasitas usaha, munculnya usaha baru, serta peningkatan pendapatan masyarakat, meskipun masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti keterbatasan modal, akses pasar, dan pendampingan yang belum optimal.

Selanjutnya, penelitian ini juga mengindikasikan bahwa governansi kolaboratif memiliki peran strategis dalam memperkuat koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, meningkatkan transparansi, serta mendukung proses verifikasi dan validasi data kemiskinan. Dalam konteks ini, DTKS berfungsi sebagai instrumen utama dalam menentukan ketepatan sasaran program-program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan yang perlu diatasi, seperti keterlambatan dalam pembaruan data, serta adanya inclusion error dan exclusion error. Oleh karena itu, penguatan sinergi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha yang berkelanjutan, serta pemutakhiran DTKS secara berkala menjadi langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mewujudkan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

REFERENSI

Amiruddin, A., & Hasim, H. (2023). The contribution of non-cash food assistance programs to improving household welfare in Indonesia. *Media Kesejahteraan Sosial*, 7(2), 89–102.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research*

- and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Barrientos, A. (2010). *Social protection and poverty*. Social Policy and Development Programme Paper No. 42. United Nations Research Institute for Social Development.
- Cahyadie, R., Juanda, B., Fauzi, A., & Kinseng, R. A. (2023). Data integration and targeting accuracy in poverty alleviation programs in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 15(3), 411–425.
- Devereux, S., & Sabates-Wheeler, R. (2004). *Transformative social protection*. IDS Working Paper 232. Institute of Development Studies.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fahriza, A., & Nurrahman, N. (2026). Collaborative governance and local poverty reduction: Evidence from Indonesian local governments. *Public Sector Studies Journal*, 8(1), 33–49.
- Feoh, G., Lambelanova, R., & Tarigan, A. (2025). Collaborative governance in poverty alleviation policy implementation at the local government level. *ESA: Journal of Public Administration*, 6(1), 55–70.
- Gasior, K., Wright, G., Barnes, H., & Noble, M. (2024). Adaptive social protection and poverty reduction: Lessons for developing countries. *Social Policy & Administration*, 58(4), 623–641.
- Hanandita, W., & Tampubolon, G. (2016). Does multidimensional poverty measurement provide useful policy insights? Evidence from Indonesia. *Social Indicators Research*, 127(1), 49–67.
<https://doi.org/10.1007/s11205-015-1044-0>
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464.
<https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>
- Lawelai, H., & Nurmandi, A. (2023). The model of collaborative governance in addressing poverty in Indonesia. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer*, 1(1), 1–14.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Priambodo, A., & Djirimu, M. (2024). The impact of village funds, social assistance, and government credit programs on poverty reduction in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 1–15.
- Rahmadevi, R., & Hertati, D. (2024). Collaborative governance in empowering micro, small, and medium enterprises (MSMEs) for community economic development. *Heliyon*, 10(18), e36564.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e36564>
- Simangunsong, F., & Sihotang, R. (2023). The effectiveness of social assistance programs in reducing poverty among vulnerable households in Indonesia. *Local Economy Journal*, 2(1), 45–58.
- Suharto, E. (2021). *Kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Widyaningsih, N., Ruhmaniyati, R., & Toyamah, N. (2023). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) and social assistance targeting in Indonesia.



Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 31(2),
145–160.

Widyawati, W., Sangkala, S., & Rusdi, M.
(2026). Integrative governance for
extreme poverty alleviation in
Jeneponto Regency of Indonesia.
Discover Sustainability, 7(691).
<https://doi.org/10.1007/s43621-026-03108-w>

World Bank. (2024). *Poverty, prosperity, and planet report 2024: Pathways out of the polycrisis*. Washington, DC: World Bank.